



**Universitas Katolik Parahyangan**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik**

*Terakreditasi Unggul*

*SK BAN-PT NO. 3765/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/VI/2022*

**Partisipasi Masyarakat Dalam Program Inovasi  
Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK)  
di Kelurahan Cihaurgeulis, Kecamatan Cibeunying Kaler**

Skripsi

Diajukan untuk Ujian Sidang Jenjang Sarjana

Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Oleh

Priskila Ribka Jelita

6071801076

Bandung  
2022



**Universitas Katolik Parahyangan**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik**

*Terakreditasi Unggul*

*SK BAN-PT NO. 3765/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/VI/2022*

**Partisipasi Masyarakat Dalam Program Inovasi  
Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK)  
di Kelurahan Cihaurgeulis, Kecamatan Cibeunying Kaler**

Skripsi

Oleh

Priskila Ribka Jelita

6071801076

Pembimbing

Indraswari, MA., Ph.D.

Bandung  
2022

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
 Jurusan Administrasi Publik  
 Program Studi Administrasi Publik Program Sarjana



**Tanda Pengesahan Skripsi**

Nama : Priskila Ribka Jelita  
 Nomor Pokok : 6071801076  
 Judul : Partisipasi Masyarakat Dalam Program Inovasi  
 Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) di  
 Kelurahan Cihargeulis, Kecamatan Cibeunying Kaler

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana  
 Pada Kamis, 30 Juni 2022  
 Dan dinyatakan **LULUS**

**Tim Penguji**

**Ketua sidang merangkap anggota**

Tutik Rachmawati, SIP., MA., PhD

: \_\_\_\_\_

**Sekretaris**

Indraswari, M.A, Ph.D.

: \_\_\_\_\_

**Anggota**

Hubertus Hasan, Drs., M.Si

: \_\_\_\_\_

Mengesahkan,  
 Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Priskila Ribka Jelita  
NPM : 6071801076  
Jurusan/Program Studi : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Program : Ilmu Administrasi Publik  
Judul : Partisipasi Masyarakat Dalam Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) di Kelurahan Cihaurgeulis, Kecamatan Cibeunying Kaler

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggungjawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari di ketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 13 Juni 2022



Priskila Ribka Jelita

## HASIL UJI PLAGIARISME

Evaluasi Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan  
Kewilayahan (PIPPK) di Kelurahan Cihaurgeulis, Kecamatan  
Cibeunying Kaler

### ORIGINALITY REPORT

<b>20%</b>	<b>19%</b>	<b>8%</b>	<b>9%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>repository.unpar.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>2</b>	<b>repository.ub.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>3</b>	<b>peraturan.bpk.go.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>4</b>	<b>digilib.uinsgd.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>5</b>	<b>Repository.unpar.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>6</b>	<b>Submitted to Catholic University of Parahyangan</b> Student Paper	<b>&lt;1%</b>
<b>7</b>	<b>id.scribd.com</b> Internet Source	<b>&lt;1%</b>
<b>8</b>	<b>media.neliti.com</b> Internet Source	<b>&lt;1%</b>

## ABSTRAK

Nama : Priskila Ribka Jelita  
NPM : 6071801076  
Judul : Partisipasi Masyarakat Dalam Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) di Kelurahan Cihaurgeulis, Kecamatan Cibeunying Kaler

---

Penelitian berikut bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana partisipasi masyarakat dalam Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) di Kelurahan Cihaurgeulis, Kecamatan Cibeunying Kaler. Pelaksanaan PIPPK berlandaskan Perwal Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Bandung 15 tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan. Penelitian tersebut menggunakan teori William Dunn yang mempunyai 6 kriteria evaluasi yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan studi dokumen. Analisis data dilakukan dengan deskriptif (pengumpulan data, mereduksi data, penyajian data dan kesimpulan) demi mendapatkan gambaran secara mendalam mengenai objek penelitian. Penelitian difokuskan terhadap pengurus PIPPK di Kelurahan Cihaurgeulis, berbagai LKK, Lembaga RW, PKK, Karang Taruna, LPM dan masyarakat dengan jumlah informan sebanyak 17 orang. Panduan wawancara penelitian ini terdiri dari pertanyaan - pertanyaan yang berhubungan dengan pencapaian tujuan PIPPK (Efektivitas), sumberdaya PIPPK (Efisiensi), kecukupan sumberdaya yang dimiliki untuk mencapai tujuan PIPPK (kecukupan), strategi distribusi dana dan pemerataan informasi (Pemerataan), kepuasan masyarakat (Responsivitas), dan ketepatan kelompok sasaran dan tujuan PIPPK (Ketepatan).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan PIPPK di Kelurahan Cihaurgeulis didukung dengan berbagai upaya yang dilakukan secara nyata dan tujuan yang tercapai sehingga kriteria-kriteria evaluasi kebijakan dalam teori William Dunn terpenuhi.

***Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat, PIPPK, Kelurahan Cihaurgeulis***

## ABSTRACT

Name : Priskila Ribka Jelita  
NPM : 6071801076  
Title : Community Participation in the Regional Development and Empowerment Innovation Program (PIPPK) in Cihaurgeulis Village, Cibeunying Kaler District

---

The following research aims to evaluate how the community participates in the Regional Development and Empowerment Innovation Program (PIPPK) in Cihaurgeulis Village, Cibeunying Kaler District. The implementation of the PIPPK is based on the Bandung City Regulation Number 27 of 2021 concerning the Third Amendment to the Regulation of the Mayor of Bandung 15 of 2019 concerning Technical Guidelines for the Implementation of the Regional Development and Empowerment Innovation Program. This study uses William Dunn's theory which has 6 evaluation criteria, namely effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy.

This study qualitative methods and researchers used data collection techniques, namely interviews, observations, and document studies. Data analysis was carried out descriptively (data collection, data reduction, data presentation and conclusions) in order to get an in-depth picture of the research object. The research focused on PIPPK administrators in Cihaurgeulis Village, various LKK, RW Institutions, PKK, Youth Organizations, LPM and the community with a total of 17 informants. This research interview guide consists of questions related to the achievement of PIPPK goals (Effectiveness), PIPPK resources (Efficiency), adequacy of available resources to achieve PIPPK goals (adequacy), fund distribution strategies and information distribution (Equity), community satisfaction ( Responsiveness), and the accuracy of the target group and PIPPK objectives (Accuracy).

The results of this study indicate that the success of PIPPK in Cihaurgeulis Village is supported by various real efforts and goals that have been achieved so that the policy evaluation criteria in William Dunn's theory are met.

**Keywords** : *Community Participation, PIPPK, Cihaurgeulis Village*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan segala berkat dan nikmat serta kemudahan dan kelancaran kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan baik dengan judul “PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM INOVASI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN KEWILAYAHAN (PIPPK) DI KELURAHAN CIHAURGEULIS, KECAMATAN CIBEUNYING KALER”

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana administrasi public jenjang Pendidikan Strata Satu (S1) jurusan administrasi publik pada Universitas Katolik Parahyangan. Selama proses penyusunan penelitian skripsi ini tidak sedikit hambatan, tantangan, dan kesulitan yang penulis hadapi, tetapi penulis bersyukur karena dapat dilalui sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua yang selalu mendukung dan memberi masukan kepada penulis dalam setiap kegiatan, kasih sayang dan doa untuk penulis setiap saat sehingga penulis mampu melewati hari-hari selama menyusun penelitian skripsi dengan baik.
2. Bapak Mangadar Situmorang, Ph.D Rektor Universitas Katolik Parahyangan.
3. Bapak Dr. Pius Sugeng Prasetyo DEKAN Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan.



4. Ibu Indraswari, MA., Ph.D. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan ilmu bermanfaat bagi penulis dan bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Pak Heri selaku bagian pelayanan PIPPK di Kecamatan Cibeunying Kaler yang telah bersedia meluangkan waktunya dalam penelitian ini hingga selesai
6. Ibu Nunung sebagai Kasi Kesejahteraan Sosial dan Pejabat Pelaksana Teknis Kelurahan Cihaurgeulis, yang telah meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam memperoleh data dan informasi
7. Teh Ridha sebagai pegawai di Kelurahan Cihaurgeulis yang telah membantu penulis dalam memberikan banyak informasi untuk penelitian ini
8. Pak Sakim, Pak Ghufro, Bu Ari, dan A Angga selaku pegawai di Kelurahan Cihaurgeulis yang telah membantu peneliti dalam memberikan beberapa informasi untuk penelitian ini
9. Pak Supendi dan Pak Rudi selaku Ketua RW yang telah membantu penulis dalam mengumpulkan data
10. Athaya Wandita, Damani, Shakila Iskandar, Dhifan Fadhillah, dan Rufia Jasmine selaku teman – teman seperbimbingan
11. Juan Laurent Buntaran yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis
12. Dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis dalam membuat skripsi ini. Akhir kata penulis

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan serta dukungannya, semoga mendapatkan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa dan dapat memberikan manfaat yang cukup berharga bagi pembacanya.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang Penelitian .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah .....</b>	<b>10</b>
<b>1.3 Identifikasi Masalah .....</b>	<b>11</b>
<b>1.4 Tujuan Penelitian .....</b>	<b>11</b>
<b>1.5 Manfaat Penelitian .....</b>	<b>12</b>
<b>BAB II .....</b>	<b>13</b>
<b>KERANGKA TEORI .....</b>	<b>13</b>
<b>2.1 Konsep Kebijakan Publik.....</b>	<b>13</b>
2.1.1 Pengertian Kebijakan .....	13
2.1.2 Pengertian Administrasi Publik .....	14
2.1.3 Pengertian Kebijakan Publik .....	14
2.1.4 Kategori Kebijakan Publik .....	16
2.1.5 Tahapan Proses Kebijakan Publik.....	18
<b>2.2 Konsep Partisipasi .....</b>	<b>20</b>
<b>2.3 Konsep Evaluasi Kebijakan Publik.....</b>	<b>22</b>
2.3.1 Pengertian Evaluasi .....	22
2.3.2 Pengertian Evaluasi Kebijakan Publik .....	22

2.3.3	Evaluasi Program .....	23
2.3.4	Tujuan Evaluasi Program .....	24
2.3.5	Model Evaluasi Kebijakan.....	25
<b>2.4</b>	<b>Konsep Pembangunan dan Pemberdayaan .....</b>	<b>28</b>
2.4.1	Pengertian Pembangunan .....	28
2.4.3	Pengertian Pemberdayaan.....	28
<b>2.5</b>	<b>Kerangka Teori.....</b>	<b>29</b>
<b>2.6</b>	<b>Model Penelitian .....</b>	<b>32</b>
<b>BAB III.....</b>	<b>.....</b>	<b>33</b>
<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>.....</b>	<b>33</b>
<b>1.1</b>	<b>Jenis Penelitian .....</b>	<b>33</b>
<b>1.2</b>	<b>Peran Peneliti.....</b>	<b>34</b>
<b>1.3</b>	<b>Lokasi penelitian.....</b>	<b>34</b>
<b>1.4</b>	<b>Sumber data.....</b>	<b>34</b>
1.4.1	Sumber Data Primer.....	34
1.4.2	Sumber Data Sekunder.....	35
<b>1.5</b>	<b>Teknik Pengumpulan Data.....</b>	<b>36</b>
<b>1.6</b>	<b>Analisis Data .....</b>	<b>37</b>
<b>a.</b>	<b>Pengecekan Keabsahan Temuan .....</b>	<b>38</b>
<b>BAB IV .....</b>	<b>.....</b>	<b>39</b>
<b>PROFIL PENELITIAN.....</b>	<b>.....</b>	<b>39</b>
<b>4.1</b>	<b>GAMBARAN UMUM.....</b>	<b>39</b>
4.1.1	Kondisi Geografis .....	39
4.1.2	Administrasi Pemerintahan.....	40
4.1.3	Data Dinamis .....	40
<b>4.2</b>	<b>Profil Kelurahan Cihaurgeulis.....</b>	<b>41</b>
4.2.1	Visi dan Misi.....	41
<b>4.3</b>	<b>Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahaan di Kelurahan Cihaurgeulis.....</b>	<b>42</b>
4.3.1	Definisi PIPPK.....	42
4.3.2	Tujuan PIPPK .....	43
4.3.3	Struktur Organisasi.....	43

<b>BAB V.....</b>	<b>44</b>
<b>ANALISIS DATA .....</b>	<b>44</b>
<b>5.1 Efektivitas Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan     Kewilayahan (PIPPK) .....</b>	<b>44</b>
<b>5.2 Efisiensi Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan     Kewilayahan (PIPPK) .....</b>	<b>57</b>
<b>5.3 Kecukupan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan     Kewilayahan (PIPPK) .....</b>	<b>72</b>
<b>5.4 Perataan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan     Kewilayahan (PIPPK) .....</b>	<b>79</b>
<b>5.5 Responsivitas Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan     Kewilayahan (PIPPK) .....</b>	<b>86</b>
<b>5.6 Ketepatan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan     Kewilayahan (PIPPK) .....</b>	<b>95</b>
<b>BAB VI.....</b>	<b>101</b>
<b>KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>101</b>
<b>6.1 Kesimpulan .....</b>	<b>101</b>
<b>6.2 Saran .....</b>	<b>104</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>107</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>111</b>
<b>Lampiran Wawancara.....</b>	<b>112</b>
<b>Lampiran Kebijakan .....</b>	<b>116</b>
.....	<b>116</b>
.....	<b>117</b>
<b>Lampiran Dokumentasi Wawancara.....</b>	<b>118</b>
<b>Lampiran Kartu Bimbingan .....</b>	<b>121</b>
<b>Lampiran Pengantar Penelitian .....</b>	<b>124</b>

**DAFTAR TABEL**

<b>Tabel 1.1 .....</b>	<b>7</b>
<b>Laporan Realisasi Anggaran PIPPK Tahun 2018-2021 .....</b>	<b>7</b>
<b>Tabel 2.1 Kriteria Kebijakan .....</b>	<b>31</b>
<b>Tabel 4.1 Jumlah RT/RW .....</b>	<b>40</b>
<b>Tabel 4.2 Lembaga Kemasyarakatan.....</b>	<b>41</b>
<b>Tabel 5.1. Laporan Realisasi PIPPK Tahun 2018-2021 .....</b>	<b>52</b>
<b>Tabel 5.2 Sarana dan Prasarana LKK.....</b>	<b>59</b>
<b>Tabel 5.3 Laporan Realisasi Anggaran PIPPK Tahun 2018-2021.....</b>	<b>61</b>
<b>Tabel 5.4 Peralihan Anggaran Murni - Covid (50%) Kelurahan Cihaurgeulis Tahun Anggaran 2021 .....</b>	<b>65</b>
<b>Tabel 5.5 Pelaksana Pengelola kegiatan PIPPK .....</b>	<b>68</b>

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1.1 Arah Kebijakan PIPPK .....</b>	<b>5</b>
<b>Gambar 2.1 Tahapan Proses Kebijakan .....</b>	<b>18</b>
<b>Gambar 2.1. CIPP Sebagai Sebuah Sistem .....</b>	<b>27</b>
<b>Gambar 2.2 Model Penelitian.....</b>	<b>32</b>
<b>Gambar 4.1 Struktur Organisasi .....</b>	<b>43</b>
<b>Gambar 5.1 Tanaman Hidroponik.....</b>	<b>49</b>
<b>Gambar 5.2 Communal Safety Sank.....</b>	<b>58</b>
<b>Gambar 5.3 Gapura.....</b>	<b>73</b>
<b>Gambar 5.4 Sungai Aliran Citarum.....</b>	<b>75</b>
<b>Gambar 5.5 Instagram Kelurahan Cihaurgeulis.....</b>	<b>81</b>
<b>Gambar 5.6 Alur Sumber Anggaran.....</b>	<b>82</b>
<b>Gambar 5.7 Proses Pelaksanaan kegiatan .....</b>	<b>84</b>
<b>Gambar 5.8 Plank Wisata Kampung Sablon.....</b>	<b>97</b>
<b>.....</b>	<b>97</b>

**DAFTAR LAMPIRAN**

<b>Lampiran Wawancara.....</b>	<b>112</b>
<b>Lampiran Kebijakan .....</b>	<b>116</b>
<b>.....</b>	<b>116</b>
<b>Lampiran Dokumentasi Wawancara .....</b>	<b>118</b>



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Kini banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menyejahterakan warga Indonesia. Upaya yang sudah dilakukan pemerintah untuk masyarakat salah satunya adalah melakukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam UUD Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintah Daerah yang menyebutkan bahwa pemerintahan daerah ialah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan melalui prinsip otonomi seluas luasnya didalam sistem dan prinsip NKRI yang mana dimaksud didalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>1</sup> Partisipasi masyarakat bukan hal baru dalam program pembangunan di Indonesia. Demi mencapai keberhasilan pembangunan, semua perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program harus melibatkan partisipasi masyarakat, karena yang mengetahui kebutuhan pembangunan daerah adalah masyarakat, serta masyarakat yang akan memanfaatkan dan mengevaluasi keberhasilan pembangunan di wilayahnya masing-masing.

Esensialnya pemberdayaan dan turut serta masyarakat didalam penyelenggaraan Pemda diimplementasi dalam dasar pertimbangan huruf B Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemda, yang berbunyi :

“Bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 Ayat 2

peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;”<sup>2</sup>

Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat perlu dilakukan dari perangkat daerah terbawah yaitu Kelurahan. Adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan sangat penting. Lingkungannya dapat dilakukan melalui pengembangan dari *bottom-up*. Sebagai badan terbawah yang ditegakkan oleh pemerintah daerah, Kelurahan dapat bekerja dengan lembaga-lembaga masyarakat. Lembaga masyarakat desa meliputi komite lingkungan atau disebut RT, rukun warga atau disingkat RW, kelompok pemberdayaan kesejahteraan keluarga kepanjangan dari PKK, karang taruna, lembaga pemberdayaan masyarakat atau kepanjangan dari LPM, dan lembaga sosial lainnya. Kelembagaan masyarakat di kewilayahan merupakan wadah atau saluran opini publik, gotong royong, kekeluargaan, dan solidaritas masyarakat, serta sebagai penggerak keterlibatan masyarakat.

Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Bandung melalui pembangunan dan pemberdayaan, mantan Wali Kota Bandung M. Ridwan Kamil pada tahun 2015 menyelenggarakan inovasi dengan meluncurkan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan. PIPPK dilaksanakan sebagai program pemerintah daerah Kota Bandung selaras dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

<sup>3</sup> A.idil. ‘Perencanaan Partisipatif dalam Pembangunan Lokal : Studi Kota Bandung’ *Jurnal Reformasi Administrasi Vol 5, No.2 (2018): 105.*

Program yang dikeluarkan pemerintah kota Bandung dalam melakukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan. Program PIPPK merupakan program pemberdayaan daerah, yang meliputi kegiatan Lingkup RW, Lingkup PKK, Karang Taruna, dan Lingkup LPM. Sesuai Pasal 2 ayat 2 Peraturan Walikota Bandung Nomor 15 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Daerah, dijelaskan bahwa tujuan program PIPPK demi mewujudkan sinergitas kinerja aparatur kewilayahan menggunakan lembaga Kelurahan. Kegiatan pembangunan direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh kelompok masyarakat pelaksanaan swakelola.<sup>4</sup>

Program dilaksanakan setiap tahun dan dipayungi oleh kebijakan berupa Peraturan Walikota. Untuk pelaksanaan tahun 2021 Program ini didasari pada Peraturan Walikota Bandung No 27 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan. PIPPK merupakan salah satu refleksi dari gagasan Walikota Bandung untuk meningkatkan tugas dan fungsi peran aparatur kewilayahan beserta seluruh anggota kemasyarakatan Kelurahan dalam rangka mempercepat rangka pembangunan melalui pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

Seiring berjalan waktu program-program yang terpusat oleh pemerintah daerah dilimpahkan kepada bagian kewilayahan. PIPPK sebagai salah satu program unggulan pemerintah Kota Bandung yang merupakan pelimpahan tugas

---

<sup>4</sup> Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Pasal 2 Ayat 2

dari Pemkot dalam membangun kewilayahan. Bentuk pemerintahan daerah dalam PIPPK dapat dibuktikan melalui masyarakat langsung yang dapat menentukan arah pembangunan dan pemberdayaan wilayahnya masing-masing sehingga dengan PIPPK setiap Kelurahan di Kota Bandung dapat leluasa membangun wilayahnya dengan partisipasi dari masyarakat.

Program ini melibatkan peran serta partisipasi aktif dari seluruh masyarakat. Peran masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan dimulai dari tingkat yang paling bawah khususnya dalam hal pengambil keputusan. Partisipasi aktif masyarakat dalam memecahkan masalah dapat dilakukan melalui metode pemberdayaan masyarakat.<sup>5</sup>

PIPPK ini prakteknya berada ditingkat Kelurahan yang dananya dari APBD untuk menyelenggarakan pembangunan dan pemberdayaan kewilayahan kelurahan masing-masing.

Dalam melaksanakan PIPPK, setiap LKK di Kota Bandung mendapatkan Rp 100 juta sebagai dana untuk pembangunan dan pemberdayaan di setiap RW di Kota Bandung.<sup>6</sup> Program PIPPK merupakan program rutin sejak tahun 2015. Melalui PIPPK maka tercapainya tujuan menuju *Bandung Empowerment City*, sebab terkandung semangat kebersamaan, desentralisasi, dan mendorong kemampuan kepemimpinan dari setiap aparat kewilayahan di Kota Bandung.<sup>7</sup> Hal ini tergambar dalam arah kebijakan PIPPK dalam Gambar 1.1.

---

<sup>5</sup> *Selayang Pandang PIPPK*. 2018, Setda Kota Bandung.

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Pengurus PIPPK Kelurahan Cihaurgeulis 30 September 2021

<sup>7</sup> Deni Fauzi Ramdani and Fikri Habibi, Penguatan partisipasi dilakukan dalam mendorong program smart city kota Bandung supaya masyarakat menjadi subjek utama dalam pembangunan. Hal. 125

**Gambar 1.1 Arah Kebijakan PIPPK**



Sumber: Buku Sosialisasi PIPPK, 2015

Berdasarkan gambar 1.1 sebagaimana amanat dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2013-2018, maka untuk merealisasikan RPJMD, Pemerintah Daerah Kota Bandung meluncurkan PIPPK demi mewujudkan Bandung kota pemberdayaan.<sup>8</sup>

Tolak ukur keberhasilan PIPPK dinilai dari bagaimana anggaran yang Pemerintah Kota Bandung telah berikan dapat digunakan secara maksimal dan baik oleh Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Kelurahan. Namun di samping penyerapan anggaran, ada juga faktor lain yang berperan besar dalam keberhasilan PIPPK. Indikator keberhasilan juga dimuat dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 281 Tahun 2015, dari Perwal ini dapat diukur dengan indikator keberhasilan dan target kinerja tahunan sebagai berikut :<sup>9</sup>

- a. Memenuhi kaidah perencanaan partisipatif masyarakat yang menjadi prioritas di Lembaga kewilayahan;

<sup>8</sup> Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2013-2018

<sup>9</sup> Peraturan Walikota Bandung Nomor 281 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Kota Bandung

- b. Kegiatan yang inovatif;
- c. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan swadaya dalam pembangunan;
- d. Masyarakat dapat manfaat secara langsung;
- e. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan Dokumen Perencanaan Anggaran;
- f. Upaya percepatan realisasi visi dan misi Kota Bandung sesuai RPJMD Kota Bandung 2013-2018;

Selain itu, kunci utama dalam proses pelaksanaan program ini yaitu bagaimana kinerja aparatur dalam pengelolaan keuangan juga dalam mengelola administrasi pertanggungjawabannya, dan bagaimana pengelolaan SDM-nya untuk mendukung program ini berjalan, dilihat juga bagaimana koordinasi yang terjalin antara aparatur lembaga kewilayahan dengan masyarakat .

Tahap - tahap dalam pelaksanaan PIPPK :

1. Tahap persiapan
2. Tahap perencanaan
3. Tahap pelaksanaan
4. Tahap pemantauan dan evaluasi

Kelurahan Cihaurgeulis merupakan salah satu diantara 151 kelurahan yang ada di Kota Bandung yang telah melaksanakan PIPPK. Kelurahan Cihaurgeulis berada dibawah wilayah Kecamatan Cibeunying Kaler. Kelurahan Cihaurgeulis berada di pusat perkotaan dengan karakteristik penduduk yang bermata

pencaharian wirausahawan yang dikenal sebagai ‘Wisata Kampung Sablon’. Kelurahan Cihaurgeulis terletak di jalan Jl. Surapati No.126, Cihaurgeulis, Kecamatan Cibeunying Kaler, Bandung.

Peran dari aparatur yaitu membina, melakukan pengawasan, dan mengarahkan. Masyarakat dalam program ini perannya sebagai pelaksana kegiatan dan penerima manfaat, namun banyak masyarakat yang belum tahu mengenai kegiatan PIPPK, sehingga kelurahan wajib siap siaga memfasilitasi dan membantu berbagai keperluan demi kelancaran program. Program yang berada di tingkat kelurahan ini dilaksanakan RW, LPM, PKK hingga Karang Taruna mendapatkan dana dari pemerintah melalui APBD untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan kewilayahan. Masing-masing mendapat anggaran sebesar Rp100.000.000,00. Bantuan ini tidak berbentuk uang melainkan berbentuk program yang diajukan melalui kelurahan.

**Tabel 1.1**

**Laporan Realisasi Anggaran PIPPK Tahun 2018-2021**

<b>TAHUN</b>	<b>FASILITASI</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI ANGGARAN</b>	<b>PRESEN TASE (%)</b>
<b>2018</b>	RW	1,100,000,147.00	990,458,800.00	90,04%
	PKK	100,003,000.00	99,926,200.00	99.92%
	KARANG TARUNA	100,017,722.00	99,580,600.00	99.56%
	LPM	100,000,375.00	99,630,110.00	99.63%
	<b>TOTAL</b>	<b>1,400,021,244.00</b>	<b>1,289,595,710.00</b>	<b>92.11%</b>
<b>2019</b>	RW	918,388,321.38	742,937,400.00	80,90%
	PKK	106,160,000.00	103,438,400.00	97.44%
	KARANG TARUNA	96,765,000.00	91,162,000.00	94.21%
	LPM	98,099,800.00	95,682,300.00	97.54%

	<b>TOTAL</b>	<b>1,219,413,121</b>	<b>1,033,220,100.00</b>	<b>84.73%</b>
<b>2020</b>	RW	1,061,591,225.00	803,454,628.00	75.68%
	PKK	99,999,872.00	87,768,450.00	89.00%
	KARANG TARUNA	99,997,991.00	92,551,850	92.55%
	LPM	99,999,845.00	97,318,500	97.31%
	<b>TOTAL</b>	<b>1,361,588,933</b>	<b>1,081,093,428.00</b>	<b>79.39%</b>
<b>2021</b>	RW	645,153,530.00	485,419,350.00	75,24%
	PKK	47,705,720.00	35,303,850.00	74.00%
	KARANG TARUNA	46,318,400.00	25,551,000.00	55.16%
	LPM	46,853,100.00	36,570,350.00	78.05%
	<b>TOTAL</b>	<b>786,030,750</b>	<b>582,844,550.00</b>	<b>74.15%</b>

*(Sumber: Kantor Kelurahan Cihaurgeulis, Tahun 2018-2021)*

Berdasarkan tabel 1.1 bahwa realisasi anggaran PIPPK terdiri dari fasilitasi RW, PKK, Karang taruna dan LPM pada tahun 2018 sampai tahun 2021 mengalami penurunan presentase kegiatan. Tahun 2018 penyerapan anggaran mencapai 92.11%. Tahun 2019 penyerapan anggaran PIPPK mengalami penurunan sebesar 84.73%, sedangkan tahun 2020 penyerapan anggaran mengalami sedikit kenaikan yaitu sebesar 79.39%. Kemudian tahun 2021 mengalami penurunan anggaran dimana realisasi anggaran hanya sebesar 74.15%.

Penyerapan anggaran yang belum mencapai 100% sebagaimana dilihat dari tolak ukur yang telah ditentukan menyebabkan kegiatan PIPPK belum dikatakan mencapai target. Kelurahan Cihaurgeulis periode 2018-2021 cenderung mengalami penurunan penyerapan anggaran. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat diuraikan fenomena permasalahan dalam Program PIPPK di Kelurahan Cihaurgeulis sebagai berikut dan Berdasarkan hasil wawancara dengan seksi



pelayanan Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung terdapat beberapa indikasi masalah evaluasi program yang peneliti temukan diantaranya:<sup>10</sup>

1. Output kegiatan belum mencapai target dan partisipasi masyarakat belum maksimal. Dilihat kebutuhan masyarakat yang terpenuhi belum merata, dan kinerja capaian yang belum memenuhi target.
2. Pencairan dana PIPPK dipotong dikarenakan adanya kendala di dalam aturan Perwal dan Pandemi *Virus Covid-19* maka dana tersebut dipotong sedangkan kegiatan harus rampung, maka dapat menimbulkan ketidaksesuaian kebutuhan masyarakat.
3. Sebagian besar masyarakat masih memiliki pemahaman dana Rp 100 juta rupiah berupa nominal bukan berupa program kegiatan dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pemberdayaan daerahnya.

Berdasarkan penjelasan dan wawancara dengan Bapak Heri yang merupakan pengurus bagian pelayanan PIPPK di Kecamatan Cibeunying Kaler menyebutkan bahwa :

“Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Kecamatan Cibeunying Kaler termasuk Kecamatan Top 10 di Bandung, saya saranin untuk Kelurahan yang lebih baik dihubungi dan diteliti yaitu Kelurahan Cihaurgeulis. Cukup baik dari segi konsisten sistem tata cara, partisipasi masyarakat, kolaborasi, dan swadaya masyarakat untuk program inovasinya bagaimana ntar dijelasin pak Lurahnya disana, data-data nya dan lain-lain”<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan seksi pelayan Kecamatan Cibeunying Kaler pada 30 September 2021

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Pak Heri Pengurus Pelayanan PIPPK Kecamatan Cibeunying Kaler 26 November 2021

Dari hasil wawancara tersebut peneliti memilih lokasi penelitian di Kelurahan Cihaurgeulis dalam kegiatan PIPPK karena Kelurahan ini direkomendasi oleh pihak Kecamatan Cibeunying Kaler karena Kelurahan Cihaurgeulis yang konsisten baik dalam sistem swakelola, kolaborasi, dan inovasinya. Maka, dari itu peneliti tertarik melakukan penelitian Partisipasi Masyarakat Dalam Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) di Kelurahan Cihaurgeulis.

Berdasarkan pemaparan masalah tersebut, program penting untuk digali lebih dalam dengan perspektif Evaluasi Program untuk bisa mengetahui bagaimana tingkat efektivitas yang sesuai sasaran dan menilai kondisi penerima manfaat dari PIPPK. Oleh karena itu, **“Partisipasi Masyarakat Dalam Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) di Kelurahan Cihaurgeulis, Kecamatan Cibeunying Kaler”** perlu dilakukan karena untuk membuktikan realita program PIPPK di Kelurahan Cihaurgeulis dan program dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan dan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, penelitian ini ditujukan untuk menjawab pertanyaan **“Bagaimana Partisipasi Masyarakat Dalam Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) di Kelurahan Cihaurgeulis, Kecamatan Cibeunying Kaler?”**

### **1.3 Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana efektivitas dalam Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan di Kelurahan Cihaurgeulis, Kecamatan Cibeunying Kaler ?
2. Bagaimana efisiensi pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan di Kelurahan Cihaurgeulis, Kecamatan Cibeunying Kaler ?
3. Bagaimana kecukupan pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan di Kelurahan Cihaurgeulis, Kecamatan Cibeunying Kaler ?
4. Bagaimana pemerataan informasi dan dana dalam pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan di Kelurahan Cihaurgeulis, Kecamatan Cibeunying Kaler ?
5. Bagaimana responsivitas pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan di Kelurahan Cihaurgeulis, Kecamatan Cibeunying Kaler ?
6. Bagaimana hasil ketepatan dalam Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan di Kelurahan Cihaurgeulis, Kecamatan Cibeunying Kaler?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini untuk :

1. Untuk mengetahui Partisipasi Masyarakat Dalam Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) di Kelurahan Cihargeulis, Kecamatan Cibeunying Kaler

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat berikut

- a. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian yang berhubungan dengan Administrasi Publik yaitu evaluasi kebijakan publik. Penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi penelitian lain yang berhubungan dengan evaluasi kebijakan publik.

- b. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini dapat menjadi dokumen evaluasi mengenai penilaian PIPPK. Hasil ini juga dapat menjadi masukan bagi pemerintah, kelurahan, dan masyarakat.